

ARTIKEL PROSIDING SEMINAR NASIONAL “REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA”



Judul Artikel: Rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0

Penulis: Deny Setiawan

Editor: Arief Wahyudi; Ramsul Nababan; Fazli Rachman

Judul Prosiding: Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; *Digital Library*, 15 Oktober 2019

Penerbit: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Kota Penerbitan: Medan

Tahun Terbit: 2019

Halaman: 15-24

Saran Pengutipan:

Setiawan, D. (2019). Rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. Dalam A. Wahyudi, R. Nababan, & F. Rachman (Editor), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library, 15 Oktober 2019* (hlm. 15-24). Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

INFORMASI ARTIKEL

Artikel ini telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia” di *Digital Library* Universitas Negeri Medan, Medan – Sumatera Utara. Seminar Nasional tersebut diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Pada 15 Oktober 2019.

Prosiding seminar nasional ini dapat diunduh di:

https://drive.google.com/open?id=1ZMI_eDXTvvn6Etj4roSBa32wNvSdA-AI

REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Deny Setiawan

Universitas Negeri Medan, Medan
denysetiawan1978@gmail

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0 dengan paradigma barunya yang berorientasi pada terbentuknya *desirable personal qualities*, menuntut para pengembang untuk dapat merumuskan konten dimensi: *civic knowledge, civic disposition, civic skills* yang sesuai dengan perkembangan jaman. Tiga dimensi tersebut, perlu dikembangkan lebih lanjut guna menghasilkan *a body of civic knowledge* yang dapat memenuhi harapan demokrasi dan *civil society*, utamanya dimensi *civic skills* yang mencakup *civic intellectual* dan *civic participation*. Abad global di era revolusi 4.0, menuntut sejumlah kompetensi *skills* yang diperlukan bagi anak bangsa guna dapat berdaya saing dan terampil dalam memecahkan sejumlah masalah serta dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kata kunci: rekonseptualisasi, pendidikan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Pada masa transisi saat ini, dimana proses perjalanan bangsa sedang menuju masyarakat madani (*civil society*), Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di persekolahan dipandang perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang tengah berubah di era global. Proses pembangunan karakter bangsa (*national character building*) yang sejak zaman kemerdekaan telah terbangun, perlu direvitalisasi agar sesuai dengan isi pesan konstitusi. Proses revitalisasi terhadap *national character building* yang dimaksud saat ini, diarahkan pada penciptaan tatanan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai titik sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari pemikiran inilah, Pendidikan Kewarganegaraan di era paska reformasi harus dapat melakukan pergeseran paradigmanya dari yang bersifat indoktrinasi ke arah paradigma baru yang menunjukkan *New Indonesian Civic Education*.

Sadar akan tuntutan dan kebutuhan di atas, pemerintah telah merumuskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum baik untuk pendidikan dasar maupun menengah, melalui pembekalan kompetensi dasar pada peserta didik dalam hal: (1) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang

demokratis (Depdiknas, 2003). Ditambahkan oleh Winataputra (2006, 1), bahwa tugas Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma barunya diarahkan pada pengembangan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni: (1) mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), (2) membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan (3) mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk *a good citizenship*, bukan hanya dalam dimensi rasional yang selama ini terjebak dalam budaya belajar verbalistik tetapi juga meliputi dimensi spiritual, emosional, dan sosial, sehingga paradigma baru yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan akan bercirikan multidimensional.

Namun demikian untuk menuju *New Indonesian Civic Education*, kita menyadari masih banyak kelemahan dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan, paling tidak terdiri atas kelemahan pokok, seperti: (1) kelemahan dalam filosofis Pendidikan Kewarganegaraan; (2) masih bersifat indoktrinatif dan terlalu menonjolkan moral behavioristik; (3) terjadi kesenjangan antara materi pelajaran dengan *basic* keilmuan dari kewarganegaraan; (4) penekanannya pada pembentukan warga negara yang “loyalitas”; dan (4) kurang mengembangkan kehidupan demokrasi yang partisipatif. Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan yang ada pada Pendidikan Kewarganegaraan di masa yang lalu, antara lain: (1) terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka. Jadi, menempatkan siswa sebagai obyek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) pada umumnya bersifat dogmatis dan relative; dan (4) berorientasi kepada kepentingan rezim yang berkuasa. Sementara Somantri (2001), dalam kajiannya berkesimpulan bahwa: (1) mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, termasuk juga Pendidikan Kewarganegaraan terlalu dikuasai oleh hafalan dan pemahaman mengenai fakta-fakta; (3) keterkaitan antara buku pelajaran dengan masalah-masalah sosial dalam masyarakat sangat rendah; (4) bahan pelajaran sangat membosankan dan tidak menarik, karena proses mengajar dan belajar selalu ada dalam kedudukan “*passive learning*”; (5) bahan pelajaran kurang membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri ke Perguruan Tinggi, sementara peserta didik yang putus sekolah/tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi (80%) hampir tidak bisa menarik manfaatnya untuk tugas pekerjaan maupun hidup sebagai warga negara yang baik.

Menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada, diusulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan baru, sebagai tujuan utamanya, hendaknya dapat mengembangkan kompetensi warga negara (*civic competence*), akhlak warga negara yang diinginkan (*desirable personal qualities* atau *civic virtue*) dan budaya warga negara (*civic culture*), serta nilai dan kepercayaan terhadap demokrasi (*democratic values and beliefs*) menuju terbentuknya kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk itu Winataputra (2002) lebih lanjut mengusulkan, upaya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di masa yang akan datang hendaknya: (1) memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; (2) seimbang antara pengembangan nilai moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatis-indoktrinatif, melainkan menumbuhkembangkan budaya berfikir kritis, sistematis,

kreatif, dan inovatif; serta (4) terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budanya.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di masa depan, membutuhkan sebuah paradigma baru sebagai konsekuensi tuntutan globalisasi dan proses reformasi ke arah “*New Indonesian Civic Education*”. Reformasi untuk membangun paradigma baru ini, dimulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian dapat bersinergi secara fungsional.

PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan Global

Sejak tahun 1980 Pendidikan Kewarganegaraan dalam perkembangannya mulai diwarnai oleh pentingnya nilai-nilai demokrasi. Bahkan memasuki tahun 1990, teori dan praktek demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan menjadi tren sebagai kecenderungan global hampir di semua negara. Kondisi ini menunjukkan masyarakat di berbagai negara di belahan dunia mulai memahami pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai realisasinya prinsip-prinsip demokrasi mulai disosialisasikan melalui suatu wadah pendidikan, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang diharapkan mampu mengarahkan dan mendidik warga negara agar dapat berperan aktif dalam kehidupan demokrasi dan jalannya pemerintahan.

John J. Patrick (dalam Quiqley, 2000, h. 4-7) menuliskan kecenderungan perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan secara global saat ini sebagai suatu figur kajian yang menampilkan dirinya sebagai:

1. Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki keterkaitan secara fungsional antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat (*civic skill*) dan berkembangnya nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat (*civic virtue*). Pengetahuan kewarganegaraan yang dimaksud menyangkut prinsip-prinsip dan teori demokrasi, jalannya pemerintahan yang demokratis dan perilaku demokratis masyarakat serta perbandingan nilai demokrasi antar negara. Pemahaman ini kemudian akan mengarahkan peserta didik sebagai warga negara untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan warga negara, yang kemudian didukung oleh nilai kebajikan dalam masyarakat seperti saling menghargai, kepribadian, disiplin diri, toleransi, patriotisme dan tanggung jawab.
2. Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki pola pembelajaran sistematis mengenai konsep-konsep utama. Konsep utama dalam pola pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyangkut pemerintahan demokratis dan hak-kewajiban warga negara serta informasi tentang bentuk dan tugas lembaga politik.
3. Pola pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan melalui upaya mengaplikasikan konsep-konsep utama dengan pendekatan analisis berbagai kasus yang berkembang dalam kehidupan bernegara.
4. Pengembangan keterampilan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk aktif dalam membuat keputusan. Studi kasus dan legal isu (*controversial*

- issue*) dijadikan pendekatan untuk mendorong dan melatih peserta didik sebagai warga negara agar mampu membuat keputusan.
5. Analisis perbandingan internasional tentang pemerintahan dan kewarganegaraan. Melalui analisis ini pola pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan, agar peserta didik dapat mempelajari dan kemudian membandingkan demokrasi antar negara.
 6. Pengembangan keterampilan partisipatoris dan kebajikan warga negara melalui kegiatan-kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif dalam kelompok kecil dapat mengarahkan siswa untuk memahami dan melaksanakan keterampilan memimpin, resolusi konflik, kompromi, negosiasi, kritik membangun, toleransi, sivilisasi dan kepercayaan.
 7. Penggunaan buku sumber dan pemanfaatan berbagai sumber di dalam proses belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan.
 8. Mempelajari secara aktif pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara (*civic virtue*).
 9. Menghubungkan antara isi dan proses dalam pembelajaran Kewarganegaraan dengan mensinergiskan pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara secara fungsional.

Berdasarkan sembilan kecenderungan Pendidikan Kewarganegaraan di era global di atas, diharapkan *output* dari Pendidikan Kewarganegaraan dapat menampilkan sosok pengetahuan warga negara (*a body of civic knowledge*) yang integratif dari hasil sinergi pengetahuan, keterampilan, dan *civic virtue* secara fungsional. Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa jika peserta didik dapat berpikir secara kritis dan bertindak secara efektif, serta pandai dalam menjawab berbagai isu-isu sosial kemasyarakatan (*virtuously response to a public issue*), maka mereka harus dapat memahami permasalahan-permasalahan, sumber isu dan alternatif jawaban terhadap isu, serta kemungkinan akibat dari jawaban-jawaban terhadap permasalahan/isu tersebut. Semua ini tentu didasari oleh sosok pengetahuan warga negara (*a body of civic knowledge*) yang integratif.

Perkembangan di atas merupakan kecenderungan yang terjadi dalam Pendidikan Kewarganegaraan dewasa ini. Di samping kecenderungan global Pendidikan Kewarganegaraan untuk demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan juga dipengaruhi perkembangan global lainnya. Menurut Wahab (1999) perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di era global telah terjadi pergeseran dari penekanan pada kebenaran yang bersifat *monovision* kepada *multivision*. Pendidikan Kewarganegaraan dengan sifatnya yang *multivision* akan memungkinkan lahirnya perbedaan, pilihan alternatif dalam berbagai aspek kehidupan warga negara, tumbuhnya rasa kebebasan dan persamaan dalam konteks hukum yang berkeadilan, serta penghargaan terhadap hak-hak sipil warga negara.

Pengaruh kecenderungan global lainnya yang bersifat umum meliputi: “*The global economy*”, “*Technology and Communications*” dan “*Population and environment*”. Kecenderungan-kecenderungan global itu secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pula konsep dan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan seperti yang dikemukakan oleh Cogan (1998, h. 11) bahwa: “... *that current modes of educating for citizenship will not be sufficient as we enter a new century. They require that citizens be able to focus upon many diverse elements, issues and contexts simultaneously ...the central recommendation ... that future educational policy must be based upon a*

conception of what we describe as multidimensional citizenship appropriate to the needs and demands of the early part of the 21st century.

Konseptualisasi warga negara multidimensional tersebut di atas mencakup empat dimensi, yaitu: personal, sosial, temporal dan spatial, yang secara keseluruhan akan melengkapi konsep dan paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan. Uraian ini, sekaligus menggambarkan bahwa di dalam Pendidikan Kewarganegaraan, persoalan kehidupan warga negara dalam sistem nilai demokrasi telah mengalami *globalizing* (Patrick, 2000, h. 1). Hal ini berarti di dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan saat ini kajian isi atau materi Pendidikan Kewarganegaraan, tidak hanya berorientasi dalam perspektif lokal dan nasional, namun harus menyesuaikan dengan perkembangan global yang tengah mengalir membawa nilai-nilai baru, seperti demokrasi dan *civil society*.

Rekonseptualisasi Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Berorientasi Skills

Hakekat dari upaya pemberdayaan warga negara adalah upaya pembangunan sumber daya manusia, sehingga cara yang dipandang paling strategis adalah melalui proses pendidikan. Untuk itulah, alternatif paradigma pendidikan yang seharusnya dianut pada era reformasi adalah “pendidikan untuk pemberdayaan.” Dalam sistem pendidikan nasional, tanpa mengesampingkan mata pelajaran yang lain, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja harus lebih mampu berfungsi secara efektif dalam pemberdayaan warga negara, sebab objek material mata pelajaran ini terutama adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dari sinilah perlu dirumuskan visi, misi, dan peran Pendidikan Kewarganegaraan baru. Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma lama jelas tidak dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan warga negara, bahkan sebaliknya justru dapat menjadikan warga negara semakin tidak berdaya.

Paradigma baru yang diusulkan dalam Pendidikan kewarganegaraan haruslah berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et.al (1999, h. 25) mengemukakan, *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh pendidik, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*.

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Akan tetapi pengertian “warga negara yang baik” itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa “revolusioner”, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasila, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Agar siswa memiliki kompetensi seperti itu, diperlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan, serta watak yang mendukung pengembangan kemampuan tersebut. Sehubungan dengan hal

itu, Suryadi dan Somardi (2000, h. 5) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*, dan (3) *civic disposition*. Dalam prosesnya, tiga komponen tersebut bersinergi secara fungsional, sehingga diharapkan dapat menghasilkan “warga negara yang baik” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan memperhatikan tiga komponen di atas dan berorientasi pada sistem kehidupan global, maka materi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara, tidak saja fungsional dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam era kehidupan global.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara. Setiap orang perlu memiliki kesempatan untuk mempelajari pemerintahan dan masyarakat madani. Pembekalan materi tersebut akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang hakekat kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berpemerintahan, dan mengapa politik dan pemerintahan itu diperlukan; tujuan pemerintahan; ciri-ciri penting pemerintahan (terbatas dan tidak terbatas); hakekat dan tujuan konstitusi; dan cara-cara alternatif mengorganisasikan pemerintahan.

Pembelajaran materi ini hendaknya meningkatkan pemahaman yang lebih banyak tentang hakekat dan pentingnya masyarakat madani atau jaringan kompleks asosiasi-asosiasi politik, sosial, dan ekonomi yang dibentuk secara bebas dan sukarela. Masyarakat madani bukan hanya mencegah penyelewengan atau pemusatan kekuasaan yang berlebihan oleh pemerintah; organisasi-organisasi masyarakat madani berfungsi sebagai laboratorium publik tempat warga negara belajar demokrasi dengan cara mempraktekannya secara langsung (Suryadi dan Somardi, 2000).

Sedangkan komponen yang kedua adalah *civic dispositions*. Disposisi kepribadian warga negara yang mendukung efektivitas politik individu, keberfungsian sistem politik yang sehat, bermartabat dan memiliki harga diri sebagai suatu bangsa, serta peduli terhadap kepentingan umum, adalah cermin kepribadian warga negara yang diperlukan di era global. *Center for Civic Education* (1994), menggambarkan *a good citizenship* dapat menampilkan dirinya:

1. Menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Disposisi ini meliputi kepatuhan secara suka rela terhadap standar perilaku yang dibebankan sendiri daripada memerlukan pembebanan dari kontrol luar, penerimaan tanggung jawab terhadap akibat-akibat dari perbuatan sendiri dan pemenuhan kewajiban moral dan hukum dari keanggotaan dalam masyarakat demokratis;
2. Memikul tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri, menopang keluarga, merawat, mengurus, dan mendidik anak sendiri. Termasuk juga ke dalam disposisi ini adalah berwawasan tentang persoalan-persoalan publik, memberikan suara, membayar pajak, memberi pelayanan publik, dan memangku jabatan kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri;
3. Hormat terhadap harga diri dan martabat kemanusiaan. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pandangan-pandangannya, berperilaku menurut cara yang

- santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan dengannya;
4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kemasyarakatan menurut cara yang penuh pemikiran dan efektif. Disposisi ini menghendaki wawasan yang luas sebelum memberikan suara atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam wacana yang santun dan reflektif, dan memangku kepemimpinan jika sesuai. Disposisi ini pun menghendaki penilaian apakah dan kapankah kewajiban seseorang sebagai warga negara menghendaki bahwa keinginan dan kepentingan pribadi dikesampingkan demi kepentingan umum dan penilaian apakah dan kapankah kewajiban-kewajiban seseorang atau prinsip-prinsip konstitusi mewajibkan seseorang untuk menolak harapan-harapan kewarganegaraan tertentu;
 5. Meningkatkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat. Disposisi ini meliputi wawasan dan perhatian terhadap urusan-urusan publik, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik dan lembaga publik terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat jika mereka tidak mematuhi. Disposisi ini pun memberi kecenderungan warga negara untuk bekerja melalui cara-cara damai dan berdasar hukum, untuk mengubah peraturan hukum yang dianggap tidak bijak atau tidak adil

Dua dimensi di atas sebagai komponen dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilengkapi dengan dimensi yang ketiga yakni *skills* atau keterampilan. Bahkan dimensi ini menjadi sangat penting berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan bagi peserta didik untuk dapat berdaya saing di era global, yang kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0. Konsep *civic skills* di era ini perlu dikembangkan dan pilah yang mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Keterampilan intelektual penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab, karena konsep ini menekankan pada keterampilan berpikir kritis hingga peserta didik dapat terampil dalam mengambil keputusan. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik.

Berikutnya adalah *participation skills* (keterampilan partisipasi) yang dalam kehidupan demokrasi oleh Aristoteles (Branson, dkk., 1999, h. 4) dilukiskan dengan: “Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan.” Dengan kata lain cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya.

Oleh karena itu, usulan dalam tulisan ini perlunya pengembangan keterampilan kewarganegaraan dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan yang meliputi *intellectual skills* dan *participation skills*. Dua keterampilan tersebut, oleh *Center for Civic Education* (1994, h. 127-135) dikembangkan dan dijabarkan seperti berikut:

Tabel 1. Keterampilan Kewarganegaraan

KETERAMPILAN INTELEKTUAL	KETERAMPILAN PARTISIPASI
<p>1. Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membedakan; - Mengelompokkan/mengklasifikasikan; - Menentukan bahwa sesuatu itu asli. <p>2. Menggambarkan (memberikan uraian/ilustrasi), misalnya tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses; - Lembaga; - Fungsi; - Alat; - Tujuan; - Kualitas. <p>3. Menjelaskan (mengklasifikasi/menafsirkan), misalnya tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa; - Makna dan pentingnya peristiwa atau ide; - Alasan bertindak. <p>4. Menganalisis, misalnya tentang kemampuan menguraikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur-unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi; - Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi; - Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik. <p>5. Mengevaluasi pendapat/posisi: menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan dan kelemahan isu/pendapat; - Menciptakan pendapat baru. 	<p>1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam keterampilan ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun; - Menjelaskan artikulasi kepentingan; - Membangun koalisi, negoisasi, kompromi; - Mengelola konflik secara damai; - Mencari konsensus. <p>2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, yang termasuk keterampilan ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik; - Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk keterampilan ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/DPD,

KETERAMPILAN INTELEKTUAL	KETERAMPILAN PARTISIPASI
<p>6. Mengambil pendapat/posisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil seleksi berbagai posisi; - Membuat pilihan baru. <p>7. Mempertahankan pendapat/ posisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan/diambil/ dibela; - Merespons posisi yang tidak disepakati. 	<p>pertemuan wali kota, lobby, peradilan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan suara dalam suatu pemilihan; - Membuat petisi; - Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian di hadapan lembaga publik; - Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain; - Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Sumber: Center for Civic Education (1994).

Pemikiran ini mendasari rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0 dengan paradigma barunya yang tidak hanya berorientasi pada tujuan *a good citizenship*, namun lebih luas lagi yakni *desirable personal qualities*, sebagai wujud pemberdayaan warga negara yang dapat diandalkan yang terampil dalam mengambil keputusan dan terampil dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

Pendidikan Kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0 dengan paradigma barunya menuntut para pengembangan untuk dapat merumuskan dimensi: *civic knowledge, civic disposition, civic skill* sesuai dengan perkembangan jaman. Tiga dimensi tersebut, perlu dikembangkan lebih lanjut guna menghasilkan *a body of civic knowledge* yang dapat memenuhi harapan demokrasi dan *civil society*. Abad global di era revolusi 4.0, menuntut sejumlah kompetensi yang diperlukan bagi anak bangsa guna dapat berdaya saing dan terampil dalam memecahkan sejumlah masalah serta dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan demikian, paradigma baru untuk Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis yang meletakkan demokrasi sebagai titik sentralnya. Namun demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, bukanlah demokrasi universal yang bernuansa sekuler, tetapi demokrasi yang seharusnya tetap berpegang pada pilar Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan hal tersebut, Sanusi (1998: 4-12) mengusulkan *The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy* bagi demokrasi Indonesia, yang meliputi: demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan kecerdasan warga negara, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan “*rule of law*”, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi dengan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M. S., dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.
- Center for Civic Education. (1994). *National Standards for Civics and Government*. Calabasas, CA: CCE.
- Cogan, J.J. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Depdiknas. (2003). *Mata Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Patrick, J. J. (1999). "Concepts, at the Core Education for Democratic Citizenship," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick (eds.), *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 1-40.
- Patrick, J. J. (1999). "Defining, Delivering, and Defending a Common Education for Citizenship in a Democracy," dalam John J. Patrick, Gregory E. Hamot, dan Robert S. Leming (Eds). *Civic Learning in Teacher Education*. Vol 2, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 5-23.
- Print, M., et.al. (1999). *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.
- Quiqley, C. N. (2000). *Global Trends in Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Sanusi, A. (1998). *Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*. Bandung: Panitia Semlok PPKn IKIP Bandung.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Suryadi, Ace dan Somardi. (2000). *Pemikiran Ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. (Makalah). Bandung: CICED.
- Wahab, A. A. (1999). *Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia Bagi Terbinanya Warga Negara Multidimensional*. (Makalah). Bandung: CICED.
- Winataputra, U.S. (2002), *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam*. (Laporan). Jakarta: STAIN.
- Winataputra, U.S. (2006). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Bandung: Progam Pascasarjana UPI.